

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi adalah pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan sistematis berdasarkan standar yang diakui secara umum. Hal ini dimaksudkan agar pihak berkepentingan mengetahui posisi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Bahri, 2020: 1-2).

Siklus atau tahapan akuntansi menurut Bahri (2020: 53) dimulai dari mulai adanya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Siklus ini mencakup bagaimana transaksi itu dicatat, munculnya akun pada jurnal dan bagaimana akun itu dinilai serta disajikan pada laporan keuangan dan kembali pencatatan transaksi berikutnya seperti tahapan-tahapan sebelumnya. Berbeda dengan proses akuntansi yang berawal dari kegiatan pencatatan sampai dengan penyajian laporan keuangan.

Praktik akuntansi memiliki standar yang berlaku secara umum. Standar akuntansi dikemukakan Bahri (2020: 18) merupakan suatu metode dan format baku dalam pencatatan maupun penyajian informasi laporan keuangan. Sekumpulan standar umum disebut *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). Standar-standar ini mengatur peristiwa ekonomi yang dilaporkan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK), di dalamnya berisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi

Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia menurut Bahri (2020: 19-26) dipilah menjadi lima, yaitu SAK umum (IFRS), SAK ETAP, SAK EMKM, SAK Syariah, dan SAP. Berbeda dengan SAK umum, SAK EMKM merupakan versi SAK yang lebih sederhana dengan tujuan mempermudah UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan lengkap SAK EMKM hanya terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (IAI, 2016: 1-8). Laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas tidak terdapat pada SAK EMKM.

Entitas mikro, kecil, dan menengah atau sering disebut UMKM merupakan sasaran penggunaan SAK EMKM. UMKM di Indonesia menurut data KemenKopUKM (2021) pada tahun 2015 mencapai angka 59 juta hingga 2019 mencapai jumlah 65 juta. Dari data tersebut bisa dilihat di tahun 2022 ini pastinya melebihi angka tersebut dikarenakan berkembangnya jumlah UMKM tiap tahunnya setidaknya meningkat 1 juta. Selain memberikan keuntungan secara pribadi, UMKM juga memberikan keuntungan lain seperti membuka lapangan pekerjaan. Dengan jumlah yang tidak sedikit itu, UMKM berdampak pada peningkatan perekonomian negara. Seperti dikemukakan Wulandari (2020) penerimaan negara sebesar 80% disumbang oleh pajak. Dengan banyak dan berkembangnya UMKM pasti dapat menambah penerimaan pendapatan negara.

UMKM di Banyuwangi mencapai angka 279.706 pada tahun 2019 (MenPanRB, 2019). Namun dalam data JatimProvKUKM (2021) jumlah

UMKM di Banyuwangi hanya sejumlah 190.314. Hal ini disebabkan oleh pendataan di laman JatimProvKUKM yang sepertinya tidak sepenuhnya dari survei. Kita bisa mendaftarkan sendiri usaha kita dalam laman tersebut yang berarti kurangnya data UMKM berasal dari ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan pada para pelaku UMKM. Peneliti mendapat bahwa di lapangan usaha yang muncul semakin banyak dan bertambah seiring bertambahnya waktu, tempat yang awalnya hanya terdapat satu atau dua usaha kini bertambah satu usaha bahkan lebih.

Selain itu dalam JatimProvKUKM, UMKM di Banyuwangi masih tergolong usaha mikro dan kecil. Sedangkan di wilayah lain di Jawa Timur sudah ada UMKM yang tergolong ke dalam usaha menengah. Hanifati & Leo (2019) mendapatkan hasil bahwa dalam sejumlah UMKM yang diteliti hanya 34% yang menerapkan SAK EMKM dan 34% tersebut semua tergolong usaha menengah. Hal ini juga didapatkan oleh peneliti dari beberapa UMKM di salah satu daerah Banyuwangi, UMKM tersebut tidak pernah atau tidak tahu tentang praktik akuntansi. Salah satu pelaku UMKM mengaku hanya menulis harga barang saja dan bahkan ada yang tidak mencatat sama sekali, karena dirasa tidak penting atau tidak perlu dengan alasan sudah hafal semua.

Kecamatan Muncar merupakan wilayah industri perikanan dengan populasi penduduk paling banyak di Kabupaten Banyuwangi yaitu mencapai 138.630 jiwa (Astuti, 2022). Populasi yang padat menjadikan penduduk Muncar memerlukan lapangan pekerjaan yang banyak dan tidak hanya cukup bergantung pada industri perikanan maupun nelayan. Wilayah Kecamatan Muncar tidak hanya terbatas pada wilayah pesisir yang kebanyakan bermata

pencarian sebagai nelayan, namun juga area persawahan maupun pemukiman kota. Seperti dalam data KemenKopUKM (2021), UMKM di Kecamatan Muncar juga bertambah tiap tahunnya. Banyaknya populasi penduduk terlebih usia produktif menjadikan banyaknya pelaku UMKM yang mendirikan UMKM dikarenakan terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga pelaku UMKM membuka lapangan pekerjaan sendiri. Menurut data Astuti (2022), banyaknya industri di Kecamatan Muncar dalam angka yaitu mencapai 1267. Hal ini masih belum termasuk UMKM yang lebih banyak dan belum terdata pada BPS Banyuwangi.

SAK EMKM memang merupakan versi sederhana dari SAK umum, namun masih banyak UMKM yang terkendala dalam penerapan praktik akuntansi SAK EMKM. Hal ini dilihat dari 100 artikel berbentuk jurnal dan skripsi mengenai SAK EMKM yang telah *direview* peneliti. Data yang diperoleh berupa 79 penelitian kualitatif dan 21 penelitian kuantitatif. UMKM dalam 8 penelitian sudah menerapkan sepenuhnya SAK EMKM. UMKM dalam 31 penelitian sudah menerapkan namun belum sesuai SAK EMKM. UMKM dalam 3 penelitian belum menerapkan namun dinilai siap menerapkan SAK EMKM. UMKM dalam 33 penelitian belum menerapkan dan belum siap menerapkan SAK EMKM. 4 penelitian terakhir berupa pelatihan dalam hal penerapan SAK EMKM.

Seperti hasil 33 penelitian menyatakan UMKM belum menerapkan dan belum siap menerapkan SAK EMKM, hasil 21 penelitian kuantitatif mencerminkan kendala UMKM seperti ukuran dan lama usaha, lebih mementingkan pengembangan usaha (Prajanto & Septriana, 2018), biaya, persepsi rumit dan tidak penting, latar belakang pelaku dan pendidikan,

keterbatasan informasi, serta tidak ada sosialisasi (Armakqit, 2021), terbatas waktu, tidak ada tenaga ahli dan pendampingan (Puspitasari, 2019), tidak paham, pengetahuan minim, sumber daya tidak mumpuni (Pratiwi dkk., 2022).

Pelaku UMKM menurut (Prajanto & Septriana, 2018) cenderung melakukan perluasan bisnis daripada fokus pada melakukan pembukuan. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan agar usaha tetap bisa berjalan. Skala dan lama usaha tidak memengaruhi pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM. Usaha yang telah lama berdiri cenderung tidak memerhatikan pembukuan serta usaha yang baru berdiri lebih mengutamakan peningkatan omzet dan cara agar bisnis tetap berjalan daripada memahami pembukuan yang sesuai standar.

Armakqit (2021) menjelaskan pelaku UMKM menganggap akuntansi itu sebagai hal yang rumit atau ribet dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan akuntansi membutuhkan kecermatan data. Selain itu pelaku UMKM juga terkendala waktu untuk melakukan akuntansi yang memang pelaku UMKM tersebut memiliki pekerjaan lain selain menjalankan UMKM. Biaya juga menjadi kendala bagi UMKM untuk melakukan akuntansi sehingga tidak terdapat sumber daya manusia yang mampu. Kebanyakan pelaku UMKM mengandalkan ingatan mereka untuk menghitung keuangannya. Laba yang tidak menentu membuat pelaku UMKM hanya memperkirakan pemasukan dan pengeluaran tanpa harus mencatat. Kurangnya kemampuan UMKM dalam pengelolaan laporan keuangan juga didasari dengan rendahnya pendidikan dan pengetahuan mengenai akuntansi. Pelaku UMKM juga mengaku belum ada sosialisasi atau pelatihan mengenai akuntansi maupun

SAK sehingga mereka yang kebanyakan bukan dari pendidikan akuntansi tidak memahami tentang laporan keuangan.

Puspitasari (2019) menyimpulkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang masih tidak mengetahui apa itu SAK EMKM bahkan mereka tidak mengetahui apa itu SAK dan akuntansi untuk membuat laporan keuangan itu seperti apa. Kendala yang dialami pelaku UMKM kebanyakan mengenai pendidikan, waktu, tidak ada tenaga ahli atau pendampingan. Pelaku UMKM memang kebanyakan bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi sehingga perlu adanya tenaga ahli yang mendampingi melalui pelatihan atau sosialisasi sehingga mereka bisa menjalankan keuangan usahanya lebih baik lagi.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM yang kebanyakan merupakan kurangnya pemahaman menjadikan mereka melakukan pencatatan keuangan sesuai apa yang mereka pahami. Pratiwi dkk. (2022) menjelaskan pelaku UMKM tidak memahami pencatatan sesuai SAK EMKM bahkan administrasi secara sederhana juga tidak paham. Hal ini selain disebabkan oleh pelaku UMKM yang tidak paham dan minim pengetahuan akuntansi juga disebabkan kurangnya sumber daya yang mumpuni dan fokus dalam pengelolaan keuangan.

Kendala yang ditemukan peneliti pada UMKM Kecamatan Muncar yaitu banyaknya UMKM yang berdiri lama namun tidak ada perkembangan baik dalam segi usaha maupun pengelolaan keuangan. Kebanyakan pelaku UMKM hanya melayani pembeli dan tidak melakukan pencatatan apa pun. Selain itu juga terdapat pelaku UMKM yang melakukan pencatatan hanya

sebatas pesanan maupun rekap penjualan. Hal ini menjadikan peneliti ingin mengungkap dan mengonfirmasi kejadian sebenarnya serta mengkritisi SAK EMKM dengan fenomena pelaku UMKM tersebut.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang bertujuan mengkaji praktik penerapan SAK EMKM bagi UMKM dengan menggunakan paradigma kritis menurut perspektif *theory of planned behavior*. Selain itu belum ada penelitian kritis mengenai praktik penerapan SAK EMKM. Haryadi (2018) juga menyatakan bahwa belum banyak riset atau penelitian akuntansi yang menggunakan studi paradigma kritis sehingga peneliti ingin melakukan penelitian “Penerapan SAK EMKM Bagi Pelaku UMKM: Paradigma Kritis Perspektif *Theory of Planned Behavior*”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat disajikan dari pemaparan latar belakang adalah bagaimana praktik penerapan SAK EMKM bagi pelaku UMKM dengan menggunakan paradigma kritis perspektif *theory of planned behavior*.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji praktik penerapan SAK EMKM bagi pelaku UMKM dengan menggunakan paradigma kritis perspektif *theory of planned behavior*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan untuk menambah pemahaman dan pembelajaran mengenai praktik penerapan SAK EMKM dan fenomena yang sebenarnya terjadi pada UMKM di masyarakat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai referensi dan sumber acuan penelitian selanjutnya mengenai SAK EMKM berupa kendala maupun penanganan masalah dan penelitian paradigma kritis. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pemerintah khususnya IAI dalam hal ini menjadi gambaran untuk bisa menangani masalah terkait praktik penerapan SAK EMKM yang masih memiliki kendala dan perlu adanya penanganan atau solusi untuk masalah kendala tersebut.